

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya persaingan yang kuat di dalam dunia usaha. Beberapa sektor usaha yang mengalami banyak kendala dalam mempertahankan kelangsungan usahanya yang terkadang mematikan usaha tersebut, oleh karena itu dibutuhkan badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang mengutamakan kesejahteraan bersama sehingga tercipta suatu tatanan hidup yang selaras.

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat dengan kegiatan - kegiatan bisnis dan persaingan antar organisasi atau antar perusahaan yang dilakukan lokal maupun global. Dengan hal ini tentu kita membutuhkan standarisasi akuntansi yang berlaku secara global guna untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan dalam menyajikan, mendeskripsikan, dan menganalisis laporan keuangan. Salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) no.27 tahun 1998 mengenai Akuntansi Perkoperasian, yang saat ini mengalami pencabutan.

Pencabutan PSAK no. 27 tentang Akuntansi Koperasi ini telah dibuktikan dengan diterbitkannya Pernyataan Pencabutan Standart Akuntansi No.8 (PPSAK no.8) pada tanggal 8 April 2011. Tidak hanya itu sejak 20 Desember 2011 pemberitahuan juga disampaikan kepada seluruh dinas dalam

bidang koperasi dan UKM Provinsi tentang pencabutan PSAK No.27 dan digantikan dengan penggunaan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Berdasarkan surat edaran tersebut, koperasi mulai 20 Desember 2011 wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk mendukung transparansi laporan keuangan.

Laporan keuangan koperasi merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi - transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2013: 7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.

Laporan keuangan koperasi memberikan informasi yang berisi kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Kehadiran Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau yang lebih dikenal dengan SAK ETAP diharapkan dapat memberi kemudahan dalam menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari SAK ETAP sendiri yakni untuk memberi kemudahan untuk entitas skala kecil dan menengah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dijelaskan dalam pasal 33 tersebut adanya dasar demokrasi ekonomi, yaitu produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilik anggota masyarakat, bukan kemakmuran orang - orang, sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Koperasi merupakan lembaga dimana orang – orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1967) koperasi adalah organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi rakyat dengan beranggotakan orang – orang atau badan – badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Ikatan Akuntan Indonesia pada 17 Juli 2009 menerbitkan standart akuntansi keuangan IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Standart akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 yaitu Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standart Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum) dan koperasi termasuk dalam entitas tanpa

akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.

Walaupun pemerintah telah memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan pada koperasi, tetapi pada kenyataannya belum semua koperasi menerapkan SAK ETAP untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang ditetapkan. Hal itu yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAK ETAP di Koperasi. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Untuk Menilai Kewajaran Laporan Keuangan Pada Koperasi”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Untuk Menilai Kewajaran Laporan Keuangan Koperasi ?
2. Bagaimana Kewajaran Laporan Keuangan Koperasi Ditinjau Dari Penerapannya Pada SAK-ETAP?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan penjelasan tentang penerapan SAK ETAP untuk menilai kewajaran laporan keuangan pada koperasi.
2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan koperasi telah sesuai dengan SAK ETAP.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengetahuan tentang SAK ETAP dalam menilai kewajaran laporan keuangan koperasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

- a. Sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan baik secara teori maupun praktik.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang akuntansi khususnya tentang Penerapan SAK ETAP untuk menilai kewajaran laporan keuangan koperasi.

2) Bagi Pengurus Koperasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.

3) Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Untuk menambah perbendaharaan literatur yang nantinya akan berguna bagi para mahasiswa sebagai studi perbandingan mencari data otentik tentang masalah yang sama yang sedang dipelajari khususnya pada program studi akuntansi.

4) Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain terutama yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, namun dari sudut pandang yang berbeda

1.5. Fokus penelitian dan Keterbatasan

Fokus penelitian dan keterbatasan ini adalah batasan-batasan yang menjelaskan fokus studi agar bahasan tidak melebar dan menimbulkan perbedaan sudut pandang dan fokus yang dihasilkan. Penggalan informasi mengenai penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) untuk menilai kewajaran laporan keuangan di koperasi, serta untuk mengetahui kondisi keuangan usaha secara riil. Untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar dari fokus yang telah ditetapkan, oleh karena itu agar penelitian ini sesuai dengan tujuan dan dapat diselesaikan dengan hasil yang diharapkan maka peneliti membatasi penelitian ini dengan subyek dan obyek penelitian. Adapun subyek dari penelitian ini adalah laporan keuangan koperasi, sedangkan obyek dari penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan koperasi.